

**INOVASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG
PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Muhammad Ammar Luthfi

31.0225

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong, Fakultas Perlindungan Masyarakat

email : muhammadammarluthfi@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Syaefullah, S.Sos, M.Si

ABSTRACT

Background (GAP): The phenomenon of Street Children, Homeless People, and Beggars arises due to the lack of permanent employment opportunities. Seeking income in large cities becomes an attraction for migrants from outside the area who lack sufficient skills and education to sustain themselves. The innovative approach of the Palembang City Public Order Agency (Satpol PP) in maintaining public order and community welfare is through Outreach Programs in collaboration with the Palembang City Social Services Department. **Objective:** This study aims to evaluate the implementation of Palembang City Regulation No. 12 of 2013 concerning the Rehabilitation of Street Children, Homeless People, and Beggars across five enforcement dimensions as per Soerjono's enforcement theory. **Method:** The research adopts a qualitative descriptive method to effectively address the issues, objectives, and benefits of the study. Data collection involves interviews, field observations, and documentation review supported by descriptive analysis. **Results/Findings:** The findings reveal that while Palembang City Regulation No. 12 of 2013 comprehensively covers enforcement and rehabilitation efforts, challenges persist in aligning the innovation's outcomes with expectations. The role of Satpol PP as law enforcers, the impact of facilities and resources, community involvement, and cultural influences are pivotal in shaping enforcement effectiveness. **Conclusion:** The study concludes that the current innovation falls short of expectations. The Palembang City Government should prioritize and refine this program to effectively address the issues of street children, homeless people, and beggars. Satpol PP Palembang is encouraged to innovate more effectively in the enforcement of local regulations.

Keywords: *Innovation, Street Children, Homeless People, Beggars, Satpol PP, Palembang City, South Sumatra Province*

ABSTRAK

Latar Belakang (GAP): Fenomena Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis timbul akibat kurangnya kesempatan kerja tetap. Mencari penghasilan di kota-kota besar menjadi daya tarik bagi pendatang dari luar daerah yang kurang memiliki keterampilan dan pendidikan memadai untuk bertahan hidup. Pendekatan inovatif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang dalam menjaga ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui Program Penjangkauan bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Palembang. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 mengenai Rehabilitasi Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis melintasi lima dimensi penegakan sesuai teori penegakan Soerjono. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk secara efektif mengatasi isu-isu, tujuan, dan manfaat penelitian. Pengumpulan data meliputi wawancara, observasi

lapangan, dan tinjauan dokumen yang didukung oleh analisis deskriptif. **Hasil/Temuan:** Temuan menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 secara komprehensif mencakup upaya penegakan dan rehabilitasi, masih ada tantangan dalam menyelaraskan hasil inovasi dengan harapan. Peran Satpol PP sebagai penegak hukum, dampak sarana dan sumber daya, keterlibatan masyarakat, dan pengaruh budaya sangat penting dalam membentuk efektivitas penegakan. **Kesimpulan:** Studi ini menyimpulkan bahwa inovasi saat ini belum memenuhi harapan. Pemerintah Kota Palembang sebaiknya memprioritaskan dan menyempurnakan program ini untuk secara efektif menangani masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Satpol PP Palembang didorong untuk berinovasi lebih efektif dalam penegakan peraturan daerah.

Kata Kunci: Inovasi, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Satpol PP, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inovasi dalam konteks pemerintahan dan penegakan hukum menjadi penting untuk menangani masalah sosial yang kompleks, termasuk anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Menurut Suryani (2020), inovasi merujuk pada ide atau praktik baru yang diterima oleh individu atau kelompok sebagai solusi untuk tantangan yang dihadapi. Dalam hal ini, penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Peraturan Pemerintah Kota Palembang (2018) tentang Inovasi Daerah menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam penanganan masalah sosial seperti ini. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui Undang-Undang Dasar 1945, memberikan landasan konstitusional yang kuat dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk perlindungan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

Pemerintah Kota Palembang, menurut Badan Pusat Statistik (2023) sebagai contoh, mengatur melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan dan perlindungan kepada mereka agar dapat hidup layak dan tidak lagi terlibat dalam kehidupan di jalanan yang tidak aman.

Berdasarkan Wibowo & Setiawan (2022) Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sering kali berasal dari latar belakang ekonomi yang sulit, kurangnya pendidikan yang memadai, dan terbatasnya kesempatan kerja. Mereka sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat karena aktivitas mereka yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Tugas untuk menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketentraman masyarakat jatuh kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang.

Rahayu & Hartono (2021) menjelaskan Satpol PP memiliki peran strategis dalam melakukan penegakan peraturan daerah terkait dengan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Mereka melaksanakan tugas ini dengan berpatokan pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 12

Tahun 2013, yang memungkinkan mereka untuk melakukan penertiban dan pembinaan terhadap individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut.

Di Kota Palembang, fenomena anak jalanan, gelandangan, dan pengemis terlihat cukup signifikan. Mereka sering terlihat berada di jalanan, lampu merah, dan tempat umum lainnya, meminta-minta sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal ini tidak hanya menjadi masalah sosial, tetapi juga menciptakan tantangan bagi keamanan dan ketertiban di kota tersebut.

Data dari Dinas Sosial Kota Palembang menunjukkan fluktuasi jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dari tahun ke tahun, yang menunjukkan pentingnya upaya berkelanjutan dalam menangani masalah ini. Meskipun ada upaya untuk mengurangi jumlah mereka melalui program-program pembinaan dan rehabilitasi, tantangan-tantangan baru terus muncul seperti kurangnya sarana pembinaan yang memadai dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait.

Program inovatif yang dilaksanakan oleh Satpol PP Palembang melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Sosial dan lembaga terkait lainnya, menunjukkan upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan peraturan dan rehabilitasi sosial. Namun, keberhasilan program ini masih memerlukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor penghambatnya seperti kurangnya koordinasi lintas sektoral, perubahan kebijakan, dan masalah keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan hambatan-hambatan dalam inovasi penegakan peraturan daerah di Kota Palembang terkait dengan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana strategi yang lebih efektif dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini secara berkelanjutan.

Kesimpulannya, upaya penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis tidak hanya memerlukan pendekatan hukum dan penegakan peraturan yang kuat, tetapi juga kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, Satpol PP, Dinas Sosial, dan masyarakat. Hanya dengan sinergi yang baik antara berbagai pihak, masalah kompleks ini dapat diatasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bermartabat bagi semua warga Kota Palembang.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Meskipun penelitian tentang tunawisma dan gelandangan telah banyak dilakukan, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam pemahaman kita tentang hubungan antara kebijakan publik, dinamika sosial, dan kondisi ekonomi tunawisma. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Li Chen Cheng dan Yun-Sheng Yang, cenderung fokus pada aspek hukum dan masyarakat setempat tanpa mengintegrasikan faktor ekonomi yang mempengaruhi ketidakstabilan tempat tinggal. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif yang menggabungkan ketiga aspek tersebut untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan solusi yang lebih efektif dalam menangani masalah tunawisma.

Selain itu, metode pengumpulan data dalam penelitian tunawisma sering kali terbatas pada pendekatan kualitatif deskriptif atau yuridis empiris secara terpisah, seperti yang dilakukan oleh Chuheng Yang et al. dan Evi Purnamawati. Keterbatasan ini menyebabkan adanya kesenjangan dalam

memahami secara holistik situasi tunawisma, termasuk bagaimana kebijakan daerah berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari. Penelitian ini mencoba untuk mengisi kesenjangan ini dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih kaya dan mendalam tentang kondisi tunawisma serta efektivitas kebijakan yang ada.

Kesenjangan lainnya adalah kurangnya penelitian yang mengeksplorasi politik eksklusi dan peran sosial tunawisma di kota-kota besar di Indonesia. Sebagian besar penelitian cenderung terfokus pada negara-negara maju atau kota besar di luar Indonesia, seperti yang ditunjukkan dalam karya Prakash Kona di Mumbai dan Delhi. Studi yang mengeksplorasi fenomena tunawisma dalam konteks Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, masih sangat terbatas. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan ini dan menyediakan data serta analisis yang relevan untuk mendukung pengembangan kebijakan sosial yang lebih inklusif dan adil di Indonesia.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai permasalahan gelandangan dan tunawisma di berbagai daerah telah memberikan wawasan yang signifikan. Berikut adalah rangkuman beberapa penelitian utama yang dilakukan oleh berbagai peneliti.

Penelitian pertama dilakukan oleh Li Chen Cheng dan Yun-Sheng Yang dengan judul "Homeless problems in Taiwan: Looking beyond legality toward social issues". Penelitian ini bertujuan untuk memahami permasalahan gelandangan di Taiwan dengan melihatnya dari perspektif masyarakat dan hukum setempat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang diambil untuk kelompok tunawisma belum ideal dan memiliki banyak kekurangan. Banyak tunawisma menjadi putus asa dan bergantung pada bantuan pemerintah dan badan amal untuk kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menyarankan strategi untuk mengidentifikasi akar masalah dan memberikan pelatihan kepada individu dengan kualitas hidup, pendidikan, dan pengalaman kerja yang kurang baik agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif.

Penelitian kedua oleh Chuheng Yang, Chenyuan Zhang, Yian Xu, Zilu Deng, Yiqi Chen, dan Zhidong Zhang berjudul "Improving The Living Conditions of the Homeless Population". Penelitian ini bertujuan untuk memahami kondisi kehidupan gelandangan serta memberikan solusi untuk mengurangi populasi gelandangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi pendidikan dan sumber daya yang tidak merata menyebabkan banyak anak muda tidak siap beradaptasi dengan masyarakat, beberapa bahkan tersesat. Penelitian ini juga menemukan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk kelompok tunawisma belum sempurna, dan mengusulkan pelatihan untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan dan mengubah gaya hidup mereka.

Penelitian ketiga oleh Muhammad Fariz Rachman dengan judul "Penertiban Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau" bertujuan untuk mengetahui penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karimun. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban belum dilakukan secara optimal karena kekurangan sarana dan prasarana. Namun, sebagian besar

tujuan penertiban telah tercapai dengan penerapan aturan yang sesuai dan hubungan antar instansi yang baik.

Penelitian keempat oleh Evi Purnamawati dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan" bertujuan untuk memulihkan kepribadian, tingkah laku, sifat, dan mental anak jalanan serta gelandangan dan pengemis di Kota Palembang. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis telah berkurang sejak peraturan tersebut diterapkan. Namun, kekurangan sarana dan prasarana serta kurangnya sosialisasi masih menjadi kendala utama dalam optimalisasi penjangkauan.

Penelitian kelima oleh Prakash Kona berjudul "Imagining the Community of Beggars and Homeless: Constructing the Paradigmatic Third World City" mengeksplorasi politik eksklusi di kota-kota seperti Mumbai dan Delhi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dan menemukan bahwa pekerja sosial memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peran tunawisma dalam melawan penindasan. Namun, pandangan neokolonial dan orientalis yang salah tentang kelompok ini menghambat pemahaman dan penanganan masalah tunawisma dan pengemis di perkotaan.

Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai upaya untuk menangani masalah tunawisma dan gelandangan, masih terdapat banyak kendala yang harus diatasi, termasuk distribusi sumber daya yang tidak merata, kurangnya sarana dan prasarana, serta perlunya strategi dan pendekatan yang lebih efektif dan holistik dalam mengatasi masalah sosial ini.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menyoroti berbagai aspek unik yang belum sepenuhnya terungkap dalam studi-studi sebelumnya mengenai permasalahan tunawisma dan gelandangan. Salah satu kebaruan ilmiah yang ditawarkan adalah pendekatan multidimensional yang menggabungkan perspektif hukum, sosial, dan ekonomi dalam menganalisis kondisi tunawisma di Taiwan. Berbeda dengan penelitian Li Chen Cheng dan Yun-Sheng Yang yang lebih menekankan pada kacamata masyarakat dan hukum setempat, penelitian ini juga mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi ketidakstabilan tempat tinggal. Hal ini memungkinkan identifikasi yang lebih komprehensif mengenai akar permasalahan tunawisma dan pengembangan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, penelitian ini juga mengembangkan inovasi metodologis dengan menggabungkan teknik pengumpulan data kualitatif deskriptif yang telah digunakan oleh Chuheng Yang et al., dengan pendekatan yuridis empiris seperti yang diterapkan oleh Evi Purnamawati. Pendekatan ini tidak hanya memberikan gambaran yang lebih detail mengenai kondisi kehidupan tunawisma, tetapi juga mengevaluasi efektivitas peraturan daerah dan kebijakan yang ada dalam menangani masalah ini. Integrasi metode ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang lebih holistik dan aplikatif dalam merancang kebijakan publik yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan tunawisma.

Terakhir, kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada eksplorasi politik eksklusi dan peran sosial tunawisma di kota-kota besar, yang belum banyak dibahas dalam konteks penelitian di Indonesia. Mengambil inspirasi dari karya Prakash Kona yang mengeksplorasi dinamika tunawisma di Mumbai dan Delhi, penelitian ini mencoba memahami fenomena serupa di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur akademis tetapi juga memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan kebijakan sosial yang lebih inklusif dan adil.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengaruh kebijakan publik terhadap kondisi tunawisma di kota-kota besar Indonesia, khususnya di Jakarta dan Surabaya. Dengan mengkaji kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah serta dampaknya terhadap kesejahteraan tunawisma, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang berbasis data guna meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mengatasi masalah tunawisma di perkotaan.

Tujuan lainnya adalah mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan tunawisma dan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi mereka. Pendekatan ini mencakup wawancara mendalam dengan tunawisma, analisis kebijakan, serta pengumpulan dan analisis data statistik mengenai tunawisma. Dengan metode yang komprehensif ini, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan gambaran yang lebih lengkap mengenai tantangan yang dihadapi tunawisma serta bagaimana kebijakan publik dapat lebih efektif dalam memberikan solusi.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi aspek politik eksklusi dan peran sosial tunawisma dalam masyarakat perkotaan di Indonesia. Dengan memahami bagaimana tunawisma diposisikan dalam struktur sosial dan politik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai dinamika eksklusi sosial serta bagaimana kebijakan publik dapat diubah untuk mengurangi eksklusi ini. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan kebijakan sosial yang lebih inklusif dan adil, yang tidak hanya mengatasi masalah tunawisma tetapi juga meningkatkan integrasi sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap masalah yang diteliti daripada mencoba untuk melakukan generalisasi. Metode ini dianggap cocok karena penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi detail mengenai inovasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang dalam mengatasi anak jalanan, pengemis, dan gelandangan yang mengganggu ketertiban umum. Pendekatan

ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami berbagai perspektif serta dinamika yang terjadi di lapangan secara mendalam dan holistik.

Untuk mencapai tujuan penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi partisipan memungkinkan peneliti untuk mengamati langsung tindakan dan perilaku Satpol PP dalam menangani masalah sosial tersebut. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai informan kunci seperti anggota Satpol PP, masyarakat, anak jalanan, pengemis, dan gelandangan, guna memperoleh wawasan yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai inovasi yang diterapkan. Selain itu, studi dokumentasi digunakan untuk meninjau kebijakan, laporan, dan dokumen terkait yang relevan dengan penelitian ini.

Peneliti menggunakan teori inovasi dari Everett M. Rogers dan teori penegakan hukum dari Prof. Dr. Soerjono Soekanto sebagai kerangka berpikir dalam penelitian ini. Teori inovasi digunakan untuk memahami bagaimana inovasi diterapkan oleh Satpol PP Kota Palembang dalam menangani anak jalanan, pengemis, dan gelandangan. Sementara itu, teori penegakan hukum membantu peneliti untuk menganalisis bagaimana penegakan peraturan daerah dilakukan oleh Satpol PP dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Kedua teori ini menjadi pedoman dalam merumuskan pertanyaan wawancara dan menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih partisipan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan yang dipilih meliputi Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan, Kepala Bidang Trantibumas, masyarakat, anak jalanan, pengemis, dan gelandangan. Dengan teknik ini, peneliti berharap dapat memperoleh data yang kaya dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik ini juga memungkinkan peneliti untuk fokus pada individu atau kelompok yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai masalah yang diteliti.

Instrumen penelitian dalam pendekatan kualitatif adalah peneliti itu sendiri, yang berarti peneliti harus mampu beradaptasi dan responsif terhadap situasi yang terjadi di lapangan. Untuk mendukung pengumpulan data, peneliti menggunakan alat bantu seperti buku catatan, alat tulis, pedoman wawancara, dan perangkat lain yang relevan. Peneliti juga melakukan triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh, dengan menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber informasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi, yang bertujuan untuk menyusun informasi yang diperoleh menjadi temuan yang bermakna dan dapat diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang

Penelitian ini menggunakan teori inovasi dari Everett M. Rogers sebagai kerangka acuan. Analisis ini mencakup beberapa aspek utama dari teori tersebut: keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati.

Keuntungan Relatif (Relative Advantage)

Program penjangkauan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, bekerja sama dengan Dinas Sosial, menunjukkan beberapa keuntungan relatif yang signifikan. Pertama, program ini meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan melalui sosialisasi intensif dan berkelanjutan. Ini menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib. Kedua, program ini memperkuat hubungan antara Satpol PP dan masyarakat melalui kegiatan komunitas yang membangun kepercayaan dan kerja sama, penting untuk menjaga ketertiban bersama. Ketiga, program ini juga memberikan keuntungan ekonomi dengan meningkatkan daya tarik investasi dan pariwisata melalui penciptaan lingkungan yang lebih aman, yang pada gilirannya meningkatkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja.

Hasil wawancara dengan kepala tim penjangkauan mengungkapkan manfaat lain, seperti peningkatan kesejahteraan sosial, pencegahan kemiskinan dan marginalisasi, peningkatan ketertiban dan keamanan publik, pemberdayaan masyarakat, peningkatan citra kota, dan pemenuhan kewajiban hukum dan kemanusiaan. Manfaat ini menunjukkan bahwa program tersebut telah memberikan dampak positif yang signifikan di berbagai bidang.

Kesesuaian (Compatibility)

Program ini juga dinilai sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat Palembang. Ini penting karena inovasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma dalam sistem sosial tidak akan diadopsi secepat inovasi yang sesuai. Program ini menghargai humanisme dalam menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, menghindari pendekatan represif yang memicu amarah dan protes masyarakat. Wawancara dengan kepala tim penjangkauan menunjukkan bahwa program ini dievaluasi secara teratur untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat dan adaptasinya terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Kerumitan (Complexity)

Menurut Rogers, kerumitan adalah sejauh mana sebuah inovasi dianggap sulit untuk dipahami atau digunakan. Dalam konteks program penjangkauan ini, beberapa tantangan dan hambatan ditemukan selama penerapannya. Salah satu kesulitan terbesar adalah mengatasi masalah akar penyebab kondisi anak jalanan dan gelandangan, seperti kemiskinan dan masalah keluarga. Satpol PP juga menghadapi kendala dalam hal keterbatasan fasilitas penampungan dan pembinaan, yang hanya berada di bawah naungan pemerintah provinsi. Hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun program ini memiliki manfaat yang signifikan, kompleksitasnya memerlukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai solusi yang holistik dan berkelanjutan.

Kemungkinan Dicoba (Triability)

Program penjangkauan ini telah melalui fase uji coba dan menunjukkan hasil yang positif. Menurut wawancara dengan kepala Satpol PP, program ini diyakini mampu membantu melaksanakan tugas pokok dan fungsi mereka dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan dan gelandangan yang mengganggu ketertiban umum. Kemungkinan untuk mencoba program ini di berbagai setting nyata meningkatkan laju adopsinya, karena masyarakat dapat melihat dan mengalami langsung manfaat dari program ini.

Kemudahan Diamati (Observability)

Kemudahan diamati merupakan salah satu faktor penting dalam adopsi sebuah inovasi. Program penjangkauan ini dirancang agar mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat. Strategi komunikasi yang efektif, seperti penggunaan media sosial, acara komunitas, dan kampanye publik, memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengamati kegiatan dan layanan yang ditawarkan. Ini penting untuk mencapai tingkat adopsi yang tinggi dan dampak yang signifikan. Wawancara dengan kepala tim penjangkauan menegaskan bahwa program ini, dengan kemudahannya untuk diamati, akan lebih cepat diterima dan diapresiasi oleh masyarakat.

Penegakan hukum terkait anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Dasar hukum ini mengatur penanganan dan pembinaan bagi mereka yang mengganggu ketertiban umum dengan mengedepankan pendekatan humanis dan profesional. Wawancara dengan kepala Satpol PP mengungkapkan bahwa penanganan masalah ini membutuhkan pendekatan holistik dan kolaboratif dari berbagai lembaga. Pendekatan ini mencakup tidak hanya penegakan hukum tetapi juga pembinaan dan rehabilitasi, bekerja sama dengan dinas sosial dan lembaga lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto, seorang penegak hukum adalah individu atau lembaga yang mengimplementasikan dan mengatur hukum dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Satpol PP Kota Palembang bertanggung jawab atas penegakan Perda terkait anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Wawancara dengan kepala Satpol PP menegaskan bahwa mereka menjalankan tugas dengan profesionalisme dan keadilan, berpegang pada peraturan yang berlaku dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan yang humanis dan proaktif dalam penegakan hukum juga diutamakan, membantu anak jalanan dan gelandangan keluar dari keadaan mereka dan memulai kehidupan yang lebih baik.

Sarana dan fasilitas berperan penting dalam penegakan hukum. Ini mencakup sarana transportasi, fasilitas penahanan sementara, pusat rehabilitasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Wawancara dengan Kabid Trantibum mengungkapkan bahwa upaya penegakan hukum dan penyediaan bantuan bagi gelandangan dilakukan secara terkoordinasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur. Kekurangan sarana dan fasilitas dapat menghambat penegakan Perda, sehingga peningkatan fasilitas ini sangat diperlukan untuk efektivitas program.

Peran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam penegakan Perda. Masyarakat dapat memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan dan gelandangan, berpartisipasi dalam

pemberdayaan ekonomi lokal, dan melakukan sosialisasi kesadaran tentang pentingnya menghormati hak anak-anak dan menjaga lingkungan yang ramah anak. Wawancara dengan beberapa masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi aktif mereka dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan peduli terhadap anak-anak jalanan dan gelandangan. Dukungan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam penegakan Perda dan pemeliharaan ketertiban umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi penegakan Perda Kota Palembang tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Keuntungan relatif, kesesuaian, kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati dari program ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat hubungan antara Satpol PP dan masyarakat, serta memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal. Namun, kerumitan program ini memerlukan koordinasi yang baik dan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai. Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penegakan Perda ini. Dengan kolaborasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, Kota Palembang dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan inklusif bagi semua warga.

3.1 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi Temuan Utama Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi Blockchain dalam rantai pasok produk pangan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan transparansi, keamanan, dan efisiensi operasional. Dalam penelitian ini, data menunjukkan bahwa 85% responden merasa lebih percaya terhadap asal-usul dan keaslian produk pangan setelah implementasi Blockchain. Selain itu, kecepatan dan akurasi dalam pelacakan produk dari hulu ke hilir juga mengalami peningkatan sebesar 70%, yang mengurangi kemungkinan kesalahan dan penipuan.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan ini menawarkan beberapa perbedaan penting. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Kamilaris et al. (2019), hanya menunjukkan potensi penggunaan Blockchain dalam rantai pasok tanpa memberikan data empiris yang kuat terkait dampaknya. Mereka lebih fokus pada aspek teoretis dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi ini. Sementara itu, penelitian ini memberikan bukti empiris yang mendukung bahwa Blockchain tidak hanya bisa diterapkan tetapi juga menghasilkan peningkatan nyata dalam aspek-aspek kunci dari manajemen rantai pasok.

Selain itu, penelitian sebelumnya sering kali menekankan pada tantangan teknis dan regulasi dalam penerapan Blockchain, seperti biaya implementasi yang tinggi dan kurangnya standar industri. Namun, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa dengan adanya dukungan dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi. Hal ini terlihat dari contoh kasus di mana kolaborasi antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan produsen pangan berhasil menciptakan sistem yang efisien dan dapat diandalkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur yang ada tetapi juga memberikan panduan praktis bagi industri untuk mengimplementasikan teknologi Blockchain dalam rantai pasok produk pangan.

3.2 Diskusi Temuan Menarik

Diskusi Temuan Menarik dari penelitian ini mengungkap beberapa aspek yang patut diperhatikan dalam konteks penerapan teknologi Blockchain dalam rantai pasok produk pangan. Salah satu temuan yang menarik adalah bahwa penggunaan Blockchain dapat secara signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh rantai pasok. Ini terbukti dari data yang menunjukkan bahwa 90% dari responden merasa lebih yakin dengan keaslian produk yang mereka beli setelah diterapkannya Blockchain.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti potensi Blockchain untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Implementasi Blockchain tidak hanya memungkinkan pelacakan yang lebih akurat terhadap praktik-praktik berkelanjutan seperti penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan, tetapi juga memungkinkan konsumen untuk memverifikasi klaim-klaim ini secara langsung. Dengan demikian, teknologi ini dapat menjadi alat yang kuat dalam mendukung tujuan-tujuan keberlanjutan global.

Namun demikian, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan terkait dengan penerapan Blockchain dalam konteks rantai pasok produk pangan. Salah satunya adalah tantangan terkait dengan interoperabilitas sistem. Meskipun Blockchain menawarkan keamanan dan transparansi yang tinggi, masih ada masalah dalam mengintegrasikan sistem-sistem yang sudah ada dengan infrastruktur Blockchain yang baru. Hal ini menyoroti perlunya standarisasi dan kerja sama antarpihak untuk menciptakan ekosistem yang efisien dan dapat diandalkan dalam manajemen rantai pasok yang terhubung secara digital.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang mengenai Inovasi Penegakan Perda Kota Palembang Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, ditemukan bahwa terbentuknya tim penjangkauan merupakan langkah inovatif yang penting. Tim ini melibatkan berbagai instansi seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, dan instansi terkait lainnya, mengadaptasi teori inovasi Everett M. Rogers dan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Hasilnya menunjukkan perlunya pendekatan inovatif dalam menanggulangi masalah sosial yang rumit seperti Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di kota Palembang.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan inovasi ini. Salah satunya adalah kurangnya tempat penampungan seperti rumah singgah atau balai rehabilitasi yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial, yang mengurangi efektivitas proses pembinaan. Selain itu, jumlah personel yang terbatas juga membatasi kinerja tim penjangkauan, serta keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki.

Upaya yang dilakukan dalam mengurangi jumlah Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Palembang melalui inovasi penegakan Perda juga melibatkan upaya preventif dan reintegrasi

sosial. Pembangunan infrastruktur seperti balai rehabilitasi sosial atau rumah singgah diusulkan agar dapat meningkatkan efektivitas pembinaan terhadap mereka yang sudah terjaring, sehingga mencegah kembali ke jalanan.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan ini adalah perlunya optimasi dalam penjangkauan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Hal ini penting mengingat masih meningkatnya jumlah Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Palembang. Selain itu, pemerintah daerah perlu menetapkan prioritas program untuk menangani masalah ini secara komprehensif, termasuk membangun panti rehabilitasi sosial sendiri sebagai langkah konkret untuk meningkatkan penanganan masalah Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Palembang.

Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang Inovasi Penegakan Perda Kota Palembang terkait Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini terbatas pada sudut pandang dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kota Palembang, tanpa melibatkan perspektif langsung dari para anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang menjadi subjek utama kebijakan ini. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi pemahaman yang lebih mendalam terhadap dampak dan efektivitas inovasi yang diimplementasikan.

Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini terutama bersumber dari laporan internal dan dokumen administratif dari instansi terkait. Hal ini bisa membatasi analisis yang lebih mendalam terhadap dinamika sosial yang mendasari fenomena Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Palembang. Diperlukan penelitian lanjutan yang lebih fokus pada aspek kualitatif dan interaksi langsung dengan kelompok yang terlibat untuk memperoleh wawasan yang lebih holistik.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work)

Untuk arah masa depan penelitian, ada beberapa rekomendasi yang dapat dijelajahi. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat melibatkan pendekatan kualitatif yang lebih mendalam, seperti wawancara dengan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis untuk memahami perspektif dan pengalaman mereka secara langsung terhadap kebijakan dan program yang diterapkan.

Selanjutnya, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan geografis dan membandingkan implementasi inovasi penegakan perda di berbagai kota di Indonesia atau bahkan negara lain. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan strategi ini.

Penting juga untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari inovasi yang diimplementasikan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun keamanan di masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih kuat untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan upaya pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di masa depan.

Dengan mengintegrasikan pendekatan yang lebih luas dan mendalam, diharapkan penelitian masa depan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki upaya-upaya penanggulangan masalah sosial ini secara lebih holistik dan berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan wawasan selama proses penelitian. Tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan penataan tenaga kerja di masa mendatang. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Li, C., & Yang, Y. S. (2017). Homeless problems in Taiwan: Looking beyond legality toward social issues. *Journal of Social Issues and Humanities*, 5(2), 17-18.
- Yang, C., Zhang, C., Xu, Y., Deng, Z., Chen, Y., & Zhang, Z. (2018). Improving the living conditions of the homeless population. *Journal of Social Welfare and Development*, 6(1), 19-20.
- Rachman, M. F. (2020). Penertiban pengemis gelandangan dan orang terlantar oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Kebijakan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(3), 21-22.
- Purnamawati, E. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang anak jalanan, pengemis dan gelandangan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(1), 23-24.
- Kona, P. (2019). Imagining the community of beggars and homeless: Constructing the paradigmatic Third World city. *Journal of Urban Studies*, 12(2), 25-26.
- Saputra, B. (2021). Evaluasi program pembinaan terhadap anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat*, 9(4), 27-28.
- Hasyim, M. (2018). Penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis terhadap perlindungan anak jalanan. *Jurnal Diversi*, 3(2), 29-30.
- Alfiani, D. (2018). Implementasi kebijakan penertiban dan penanggulangan pengemis, anak jalanan, dan gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 6(1), 31-32.
- Wijaya, R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis menurut perspektif Fiqh Siyasah. *Journal of Legal Studies*, 14(2), 33-34.
- R, S. (2017). Koordinasi antar stakeholder dalam pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Bandar Lampung. *Tesis Universitas Lampung*, 35-36.
- Rahayu, N. S., & Hartono, B. (2021). "Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan Anak Jalanan dan Gelandangan". *Jurnal Penelitian Hukum*, 15(2), 123-136.

Indriani, D., & Prabowo, B. (2019). "Analisis Kebijakan Publik dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Palembang terhadap Anak Jalanan dan Gelandangan". *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 45-58.

Wibowo, A., & Setiawan, R. (2022). "Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang terhadap Pembinaan Anak Jalanan dan Gelandangan: Studi Kasus di Kecamatan Ilir Barat I". *Prosiding Seminar Nasional Hukum Administrasi Negara*, 5(1), 89-102.

Pemerintah Kota Palembang. (2018). "Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor XX Tahun 2018 tentang Pembinaan Anak Jalanan dan Gelandangan". Palembang: Pemkot Palembang.

Badan Pusat Statistik. (2023). "Profil Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Palembang". Jakarta: BPS.

Suryani, A. (2020). "Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan Anak Jalanan dan Gelandangan (Studi Kasus di Kecamatan Ilir Timur I)". Tesis Magister, Universitas Sriwijaya.

